

PERAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PENYOKONG PILPRES PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Septia Melati Indra Putri¹, Uswatun Hasanah², Ajrina
Tamimi³, Salsabila Hasyim⁴, Hawwin Mayla Faiza⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : Septiamelati2@gmail.com, uswatunhasanah8970@gmail.com,
ajrinatamimi3@gmail.com, nasutionsalsabila583@gmail.com, faizahawwin@gmail.com

Abstract: *Political parties are a bridge that connects people's hearts and minds, and people's demands are accommodated in political parties. That is the existence of political parties in Indonesia, especially those that support presidential elections from a sharia perspective. The question in this case is how to understand the role of political parties in realizing democratic post-conflict local elections and what their views are on achieving democratic post-conflict local elections. Which discusses the role of political parties in supporting presidential elections from a political-legal perspective. The data collected regarding the history of political parties comes from books that use historical theoretical analysis to discuss political parties to date. The research results show that political parties are a bridge to communicate dissatisfaction in social life. According to Law Number 10 of 2008 and Decree Number 2 of 2008, the aim of political parties is to realize the national ideals of the Indonesian nation, as regulated in the State Constitution. Republic of Indonesia in 1945. Political parties in Indonesia have an important role in the functioning of democracy because they are part of society and are the means and means of society in conveying their aspirations and ideas for the realization of democratic values in national life. and stated within the framework of Bhinneka Tunggal Ika, all these letters are in line with the verses of the Koran and Hadith which are the source of siyasah fiqh law.*

Keywords: *Political parties, Presidential Election, Fiqh Siyasah*

Pendahuluan

Dua kelompok besar dalam masyarakat Muslim Indonesia dikenal dengan istilah santri dan abangan. Santri merujuk kepada individu Muslim yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, sementara abangan adalah mereka yang hanya mengamalkan Islam secara verbal. Perbedaan ini terkait dengan beragam pandangan politik dan pemahaman terhadap Islam. Secara umum, partai politik dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu partai politik Islam dan partai

politik Nasionalis. Pada era Orde Lama di Indonesia¹, terdapat partai politik Islam seperti Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), partai sekuler seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), dan partai komunis Indonesia (PKI).

Mayoritas kelompok Muslim santri pada periode tahun 1950-an hingga pertengahan 1960-an memberikan dukungan terhadap konsep negara Islam dan terafiliasi dengan partai politik Islam. Pada masa tersebut, kelompok Muslim di pesantren juga menerima ide-ide sekuler karena Partai Nasional Indonesia (PNI) secara aktif menentang sistem perbudakan di Indonesia. Para tokoh Islam pada periode ini mulai mempertimbangkan peran negara dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Meskipun demikian, sejak tahun 1970-an, terutama pada awal dekade 1980-an, kaum Muslim santri, termasuk yang berasal dari kelompok abangan, menjadi lebih kritis terhadap gagasan negara Islam daripada sebelumnya.

Tokoh Islam percaya bahwa masyarakat Muslim di Indonesia memiliki kecenderungan untuk bersikap moderat secara politis, terutama jika dibandingkan dengan tren yang terjadi di negara-negara lain dalam konteks kebangkitan Islam global. Di bawah pemerintahan Orde Baru, keberhasilan dalam melemahkan partai politik dilakukan dengan memaksa massa untuk tidak terikat dan menetapkan Pancasila sebagai prinsip tunggal yang harus diakui oleh semua partai politik dan organisasi massa. Depolitisasi ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh partai politik dalam masyarakat dengan merusak citra partai politik, membuat sulit bagi warga untuk bergabung dengan partai politik, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.¹

Perkembangan demokrasi di Indonesia melibatkan aturan utama yang meyakini bahwa produk-produk keputusan bersumber dari keputusan kolektif, di mana organisasi memiliki peran yang signifikan. Sikap antipati terhadap partai politik secara perlahan namun pasti muncul dalam masyarakat. Dalam konteks demokrasi, partai politik dianggap sebagai organisasi dengan hak ganda, yang berarti keputusan kolektif yang mengikat hanya dapat dicapai melalui partisipasi kelompok partai politik. Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat diwujudkan melalui partai politik sebagai representasi aktor kolektif, dan partisipasi masyarakat menjadi satu-satunya cara untuk melegitimasi keputusan mereka. Sebagai sebuah kelompok orang yang bekerja bersama, partai politik memfasilitasi pembentukan visi bersama atas kekuasaan atas nama rakyat.

¹ Adeng Muchtar, "Politik Ummat Islam Dalam Lintas Sejarah" (Bandung Pustaka Setia, 2004) Hlm 24

Oleh karena itu, pemimpin otoriter memanfaatkan partai politik sebagai alat untuk menjaga kekuasaan mereka., Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh evolusi partai politik di Indonesia. Setelah partai politik² menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan dan terlibat dalam pemilihan umum, kesadaran masyarakat terhadap peran penting partai politik dalam sistem demokrasi meningkat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, partai politik memiliki fungsi yang diakui secara legal.

Bidang fiqh siyasah tasri'iyah merupakan salah satu cabang dalam fiqh siyasah dusturiyah yang mencakup masalah ahl-al-halliwa al-aqdi. Dalam ranah ini, perwakilan rakyat diharapkan memenuhi dua syarat, yakni memiliki ilmu dan kemampuan ijtihad, serta memberikan teladan yang baik dalam kehidupan berbangsa. Salah satu aspek penting dalam politik Islam dari fiqh siyasah adalah ajaran kepemimpinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa³ Piagam Madinah. Pembentukan Piagam Madinah bertujuan untuk menghimpun masyarakat di Madinah melalui musyawarah dan keterwakilan, dengan prinsip dasar keterwakilan yang harus sesuai dengan perintah Allah SWT.

Pada masa pemerintahan Nabi, penerapan sistem kepartaian dan perwakilan tokoh-tokoh Islam menjadi representasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini menjadi dasar bagi gerakan politik Islam untuk menerapkan sistem kepartaian di Indonesia, Dalam idealisasi sistem kepartaian, kedaulatan rakyat dijadikan sebagai mekanisme checks and balance untuk memastikan bahwa lembaga perwakilan dapat menjalankan fungsinya secara seimbang. Checks and balance berperan sebagai pengawasan antar lembaga kekuasaan guna menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas mereka.

Dengan demikian, terdapat pembatasan terhadap kekuasaan lembaga negara dalam mengelola lembaga kekuasaan, yang menegaskan adanya batasan terhadap kekuatan. Sebaliknya, tingkat efektivitas lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip checks and balance yang tertera dalam konstitusi memiliki peran krusial dalam menentukan seberapa baik sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dibangun di suatu negara. Tanpa keraguan, hal ini terkait erat dengan bagaimana tradisi dan budaya pemikiran bebas berkembang dalam masyarakat yang menjalani kehidupan dalam suatu negara demokrasi, serta dengan evolusi sistem politik multipartai⁴.

² Andrew Reynolds et al..., Sistem Pemilihan (Stockholm Internasional Institute For Democracy And Electoral, 2005) Hlm 56

⁴ Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta: Gramedia, 1992) Hlm 78

Hasil Dan Pembahasan

A. Kerangka Partai Politik Dalam Fiqh Siyasah

Siyasah dusturiyah mengatur partai politik dalam konteks fiqh siyasah, di mana imamah merujuk pada seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan tentang ijtihad dan memiliki kemampuan untuk menjalankan ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan petunjuk Nabi SAW. Dalam kerangka Islam, partai politik dijelaskan sebagai suatu sistem perwakilan yang mewakili kepentingan masyarakat secara menyeluruh dengan menggunakan hukum sebagai landasan fungsinya. Dalam kaitannya dengan politik dalam kerangka hukum Islam, terdapat beberapa istilah yang digunakan.⁵

a. Taqnin – Al – Ahkam

Taqnin menjelaskan bahwa peran negara dalam ranah politik mencakup pembentukan, implementasi, dan perubahan. Pembentukan diartikan sebagai kemampuan negara dalam dunia politik untuk merumuskan kebijakan yang mencakup prinsip-prinsip hukum Islam.

b. Tathbiq

Berkaitan dengan implementasi kebijakan, kewenangan secara sah diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab, dengan menggunakan sistem perwakilan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

c. Taghyir

Taghyir dijelaskan sebagai peran untuk melakukan perubahan, dan perubahan diartikan sebagai fungsi pemerintah atau pemimpin untuk mengubah kebijakan yang tidak menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks politik dalam hukum Islam (siyasah), terdapat dua prinsip yang harus dijalankan terlebih dahulu, yaitu:

1. Universal

Prinsip universal merujuk pada prinsip ketuhanan, di mana para pemimpin diamanatkan dengan tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan atas nama Allah SWT atau bersumpah atas nama Allah SWT

⁵ Ghalia, Sistem Politik Dan Pemilu Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) Hlm 56

sebelum melaksanakan tugasnya.⁶

2. Operasional

Prinsip operasional didefinisikan sebagai prinsip yang menunjukkan bahwa dalam konteks politik Islam, isi substansinya harus mencakup kesetaraan, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

B. Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Pilpres Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam konteks Fiqh Siyasah, atau fiqh politik dalam Islam, partai politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden (Pilpres). Fiqh Siyasah mencakup prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan urusan politik dan pemerintahan dan dalam Pembentukan Kepemimpinan Partai politik dapat membantu membentuk kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam Fiqh Siyasah⁷, penting untuk memilih pemimpin yang adil, kompeten, dan yang akan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Mengusulkan Calon yang Sesuai Partai politik memiliki tanggung jawab untuk mengusulkan calon presiden yang memenuhi syarat-syarat Islam. Calon tersebut seharusnya memiliki integritas, kejujuran, dan kompetensi untuk memimpin negara dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Penyuluhan kepada Pemilih Partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada pemilih mengenai platform, visi, dan misi calon presiden yang diusung.

Hal ini untuk memastikan bahwa pemilih dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai Islam dan Mengawasi Proses Pemilihan Partai politik seharusnya ikut serta dalam mengawasi seluruh proses pemilihan agar berjalan secara transparan dan adil. Hal ini melibatkan pengawasan terhadap tahapan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan hasil Menjaga Kestabilan dan Keamanan Partai politik diharapkan berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Ini melibatkan dukungan terhadap kebijakan yang mendorong perdamaian, persatuan, dan keadilan sosial dan Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Fiqh Siyasah menekankan pentingnya implementasi prinsip keadilan sosial dalam pemerintahan.

Partai politik seharusnya memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung distribusi kekayaan yang adil dan mengatasi

⁶ Muriam Budiarto, Dasar – Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015) Hlm 70

⁷ Fariz Dkk, Sistem Politik Islam, (Jakarta: Rabbani Press, 2000) Hlm 45

ketidaksetaraan dalam masyarakat, Bertanggung Jawab terhadap Pemilih dan Masyarakat dalam Partai politik memiliki tanggung jawab moral terhadap pemilih dan masyarakat. Mereka seharusnya memegang komitmen terhadap janji-janji kampanye dan menjalankan tugas-tugasnya dengan integritas dan amanah, Penting untuk diingat bahwa pemahaman dan implementasi Fiqh Siyasah⁸ dapat bervariasi di antara berbagai ulama dan kelompok Islam. Oleh karena itu, peran partai politik dalam pemilihan presiden juga dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan nuansa yang berbeda oleh berbagai komunitas Islam.

C. Implikasi Peran Partai Politik Dalam Pemilu Di Indonesia

Faktor partisipasi partai politik dalam memberikan warna pada pemilihan presiden telah berdampak pada proses pemilihan pemimpin terbaik di Indonesia. Dan dampak dari pelaksanaan pemilihan presiden dapat dijelaskan sebagai berikut⁶

1. Dampak Positif

Akibat yang mempengaruhi kemajuan dan kelancaran pelaksanaan pilpres karena adanya peran partai politik dikenal sebagai implikasi positif. Ini memiliki beberapa konsekuensi positif, salah satunya adalah bahwa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pemilihan capres dan cawapres adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Berdasarkan asumsi bahwa partai politik⁷ memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan pemilihan presiden, hal ini memungkinkan pasangan calon untuk bersaing dalam memperebutkan posisi sebagai capres dan cawapres. Selain berfungsi sebagai pintu masuk, pasangan calon juga dapat berfungsi sebagai kendaraan bagi masing-masing calon agar mereka dapat lebih mudah bersaing untuk jabatan presiden dan jabatan kepemimpinan.⁹

Adapun yang harus dilihat dari pilpres di Indonesia sebagai berikut:

- a. Melalui pemberian kewenangan kepada partai politik sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004, terutama terkait pemilihan Pilpres, partai diharapkan melakukan upaya untuk membentuk mekanisme internal dalam merekrut kader terbaik atau individu yang berasal dari daerah

⁸ Munawir, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1993). Hlm 89

⁹ Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) Hlm 36

tersebut agar dapat diusung sebagai calon Capres. Peran partai politik dalam hal ini berfungsi sebagai alat seleksi atau penyaring dalam menciptakan para pemimpin daerah, yang kemudian akan ditawarkan kepada masyarakat sebagai pilihan pemimpin. Oleh karena itu, bagi pemilih, dengan adanya mekanisme tersebut, mereka dapat memilih dari kualifikasi terbaik yang telah disiapkan oleh partai politik masing-masing.

- b. Partai politik yang ada juga berfungsi sebagai perpanjangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas sebagai penyelenggara pemilihan capres. Dalam konteks ini, peran yang umumnya dijalankan oleh partai adalah melakukan sosialisasi mengenai prosedur pemilihan (pencoblosan) kepada anggota partai dan masyarakat umum. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara yang benar dan baik dalam mengikuti proses pemilihan. Selain itu, partai yang mendukung calon dalam Pilpres juga berusaha untuk mengenalkan para calon tersebut kepada masyarakat melalui kampanye media sehingga dapat lebih dikenal oleh publik.¹⁰
- c. Partai politik juga memiliki peran sebagai penengah konflik, terutama di antara pendukung setiap calon. Dalam pelaksanaan pemilihan, partai yang mendukung pasangan calon kepala daerah telah menekankan kepada pasangan calon tersebut untuk mengadopsi prinsip "kampanye damai" pada setiap kesempatan yang diberikan. Hal ini memiliki potensi untuk menciptakan kondisi aman dan tertib selama proses pemilihan Pilpres.¹¹

2. Dampak Buruk

Sementara ada dampak positif yang muncul dan peran partai politik tersebut dapat memberikan manfaat, ternyata kehadiran partai dalam pemilihan capres juga membawa dampak buruk. Salah satu dampak buruk yang sering terjadi adalah konflik antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga calon yang diusulkan tidak selalu sesuai dengan keinginan penduduk setempat.

¹⁰ Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994) Hlm 145

¹¹ Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, (Jakarta:Kencana, 2010) Hlm 156

- a. Dari jumlah massa partai yang besar, ketika setiap pasangan calon melakukan kampanye, seringkali partai tidak dapat mengkoordinir atau mengelola massa mereka dengan baik untuk melakukan kampanye secara teratur dan aman. Akibatnya, terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, gangguan ketertiban masyarakat, dan pelanggaran lainnya yang seharusnya dapat dihindari selama masa kampanye.

D. Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Penyokong Di dalam Pilpres

Kajian Fiqh Siyasah terhadap penyokong dalam pemilihan presiden (Pilpres) melibatkan pemahaman dan aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam terkait dukungan politik, dalam konteks ini melibatkan tanggung jawab moral, etika, dan pandangan Islam terhadap keterlibatan dalam proses politik. dari analisis Kriteria Calon Dalam Fiqh Siyasah, penyokong diharapkan mempertimbangkan kriteria Islam yang berlaku terhadap calon yang mereka dukung. Ini melibatkan pertimbangan terhadap integritas, keadilan, kejujuran, dan kemampuan calon untuk memimpin sesuai dengan nilai-nilai Islam, Komitmen terhadap Nilai-Nilai Islam Penyokong diharapkan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Islam dalam memberikan dukungan politik mereka.

dalm hal ini mencakup memastikan bahwa calon yang mereka dukung memiliki visi dan rencana yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, Penyuluhan dan Edukasi Penyokong diharapkan untuk mendukung calon secara berdasarkan pemahaman yang baik terhadap platform dan program politik calon tersebut. Partisipasi yang cerdas dan informasi yang benar dapat membantu memastikan bahwa dukungan diberikan berdasarkan pengetahuan yang memadai, Etika Kampanye Dalam Fiqh Siyasah, etika kampanye menjadi penting.¹²

Penyokong diharapkan untuk menjauhi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menyebarkan informasi palsu atau melakukan tindakan kekerasan, Partisipasi Aktif dalam Proses Demokratis Islam mendorong partisipasi aktif dalam proses demokratis selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Penyokong diharapkan untuk menggunakan hak suara mereka dan terlibat dalam kegiatan politik secara konstruktif untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, Kewajiban Menjaga Persatuan dan Kedamaian Dalam memberikan dukungan politik, penyokong diingatkan untuk menjaga persatuan dan kedamaian di masyarakat.

¹² Jimly Asshddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) Hlm 79

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya keharmonisan dalam masyarakat, Bertanggung Jawab terhadap Pilihan Politik. Penyokong diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap pilihan politik mereka. Ini mencakup pemahaman bahwa dukungan yang diberikan dapat memiliki dampak besar pada arah dan kebijakan negara, dan oleh karena itu, penyokong memiliki tanggung jawab moral atas konsekuensi dari dukungan mereka. Keseluruhan, kajian Fiqh Siyasah terhadap penyokong dalam Pilpres menekankan pentingnya keterlibatan politik yang cerdas, etis, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi ulama dan konteks sosial-politik tertentu.¹³

E. Partai Politik Sebagai Penyokong Partisipasi Politik Dalam Pemilu

Pemilu memberikan kesempatan kepada warga untuk memilih perwakilan dan menentukan pemimpin negara setelah pemilihan, menjadikannya sebagai sarana yang mudah untuk menilai sejauh mana suatu negara demokratis. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pada saat pemilihan. Tanpa itu, pemilihan hanya akan menjadi formalitas dan indikator demokrasi yang kurang bermakna. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan harus terus ditingkatkan. Namun, kenyataannya tidak demikian, hasil evaluasi Pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat selalu menurun. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak suara mereka atau menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilu.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menjelaskan mengapa partai politik belum optimal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilihan legislatif.

1. Egosentris dan Arogansi Partai Politik

Partai politik secara konsisten menyatakan klaim bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai mereka adalah yang tertinggi. Penilaian ini umumnya merujuk pada hasil survei dari lembaga penelitian yang terkenal mengenai elektabilitas partai. Terlepas dari apakah munculnya arogansi dan egosentrisme dari partai, setiap partai seharusnya kembali pada peran dan tujuan yang telah diatur oleh undang-undang. Mereka tidak seharusnya merasa superior hanya karena hasil survei yang mewakili sebagian kecil masyarakat yang dapat memberikan dampak signifikan pada kursi legislatif. Data saat ini

¹³ Leo Agustino, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007) Hlm 46

menunjukkan bahwa persentase pemilih yang aktif jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memilih untuk tidak ikut serta, menunjukkan bahwa banyak orang masih acuh tak acuh terhadap partai politik apa pun. Hal ini menunjukkan bahwa anggota partai politik yang menduduki lembaga perwakilan rakyat tidak sepenuhnya mencerminkan keberagaman masyarakat yang seharusnya diwakilinya.

2. Pendidikan Politik Yang Tak Mencukupi

Ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif menunjukkan bahwa upaya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik tidak mencapai tingkat optimal. Jarang sekali terjadi bahwa partai politik memberikan pendidikan politik secara sistematis dan terstruktur kepada masyarakat. Yang sering terjadi adalah persaingan konflik antar partai politik, yang pada akhirnya tidak membawa kemajuan tetapi malah menimbulkan apatisme dan pesimisme, yang pada gilirannya menghasilkan ketidakpedulian masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Secara prinsip, pemilihan politik yang adil, transparan, dan demokratis bertujuan untuk memilih individu yang berkompeten dan mampu memperjuangkan kesejahteraan serta keamanan bagi seluruh warga negara. Kesalahan dalam memilih kader yang menduduki posisi strategis dapat menghambat perjuangan untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, proses rekrutmen politik berpengaruh terhadap cara berpikir, bertindak, dan berperilaku setiap warga negara yang harus taat, patuh terhadap hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

3. Perekrutan Partai Yg Tidak Pas

Namun, jika melihat lebih rinci, saat ini proses rekrutmen politik belum dilakukan secara transparan, terbuka, dan demokratis, yang berarti pemilihan kader tidak bersifat objektif. Selain itu, terlihat bahwa persiapan kader tidak terorganisir dan tidak berkesinambungan. Proses pembinaan kader partai politik seringkali hanya terjadi menjelang peristiwa politik tertentu. Sebagian besar partai politik tidak mampu mengirimkan kader politik terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif¹⁵. Hal ini karena penempatan kader seringkali didasarkan pada pertimbangan subyektif tertentu tanpa

¹⁴ Pulung J Suyuti, *Fiqh Siyasah II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Utama, 1994) Hlm 97

¹⁵ Janejdri M, Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013) Hlm 60

memperhitungkan kemampuan dan dedikasi mereka untuk masyarakat, sehingga masyarakat menjadi bingung dalam memilih wakilnya dalam pemilihan legislatif. Dalam situasi seperti ini, Uang politik sangat mudah terkena risiko, dan sebagian masyarakat yang terlibat dalam pemilihan umum tidak selalu didorong oleh kesadaran politik, melainkan lebih disebabkan oleh motif finansial atau keuangan.

4. Kepentingan Yg Sementara

Selama ini, partai politik lebih fokus pada upaya meraih kekuasaan daripada membangun kepercayaan masyarakat. Menjelang pemilihan umum, terjadi peningkatan aktivitas baru dari partai politik, seperti penyebaran selebaran, pamflet, dan baliho. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dari semua alat peraga tersebut, tidak ada satu pun yang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melihat partai politik sebagai sarana untuk menyuarkan aspirasi politik mereka. Dampaknya adalah hasil yang belum memenuhi harapan yang diinginkan.¹⁶

Partai politik dan kelompoknya sering kali lebih memprioritaskan kepentingan internal daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem kehidupan politik dan sosial, dengan seringnya pergantian kabinet, partai politik yang tidak efektif, dan politik menjadi semakin tidak terarah. Harapan untuk melihat partai politik sebagai wadah yang mewakili aspirasi politik rakyat hingga menjadi kebijakan publik populis ternyata belum terwujud; aspirasi rakyat tidak terpenuhi, rasa keadilan terganggu, dan tingkat ketidakpuasan semakin meningkat. Meskipun demokrasi hanya menjadi slogan politik, namun belum diiringi oleh upaya nyata dalam memberdayakan pendidikan politik masyarakat.

Dari pembahasan Pilpres Di atas Analisis mengenai peran partai politik sebagai penyokong Pilpres (Pemilihan Presiden) dari perspektif ushul fikih atau fiqh siyasah melibatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan politik. Ushul fikih adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip dasar dalam menentukan hukum Islam, sementara fiqh siyasah adalah cabang fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku dalam pemerintahan dan politik.¹⁷

1. Prinsip Kebebasan dan Keadilan

¹⁶ Aisah Putri Budiarti Dkk, Partai Politik & Pemilu Serentak (Bandung: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021) Hlm 245

¹⁷ Nurul Huda, Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia (Jakarta: Fokus Media) Hlm 45

Ushul fikih menekankan prinsip keadilan dan kebebasan sebagai nilai-nilai penting dalam Islam. Partai politik yang mendukung Pemilihan Presiden diharapkan mempromosikan keadilan, kebebasan, dan kedamaian.

2. Syura (Musyawarah) sebagai Prinsip Demokrasi Islam

Konsep syura atau musyawarah merupakan prinsip demokrasi dalam Islam. Partai politik yang berperan dalam mendukung Pilpres diharapkan mempraktikkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan dan pemilihan calon presiden.¹⁸

3. Kemaslahatan Umum (Maslahah Mursalah)

Prinsip kemaslahatan umum mengajarkan bahwa tindakan atau keputusan harus menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Partai politik perlu mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam mendukung kandidat presiden.

4. Ta'awun (Kerjasama) dan Wilayah Hukum (Wala')

Konsep ta'awun dan wala' menekankan pentingnya kerjasama dan loyalitas kepada komunitas Muslim. Partai politik seharusnya berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

5. Penegakan Syariat Islam

Partai politik yang mendukung Pilpres seharusnya memiliki komitmen terhadap penegakan syariat Islam dan prinsip-prinsip moral dalam tindakan politiknya.

6. Transparansi dan Tanggung Jawab

Prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan politik juga harus diperhatikan oleh partai politik. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran dan akuntabilitas.

7. Pentingnya Pendidikan dan Komunikasi

Partai politik perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai Islam dan program-program yang mereka usung. Pendidikan dan komunikasi yang baik dapat membantu masyarakat memahami visi dan misi partai tersebut.

Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip ini dapat bervariasi di antara sarjana dan pemikir Islam. Oleh karena itu, partai politik yang berperan dalam Pilpres sebaiknya bekerja untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusannya sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang mendasar.

¹⁸ Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia, (Surabaya: SIC, 2002) Hlm 48

Kesimpulan

Dalam proses pemilihan presiden, peran partai memungkinkan pasangan calon untuk bersaing dalam memperebutkan jabatan presiden dan cawapres. Selain itu, peran partai tersebut juga dapat menjadi sarana bagi masing-masing calon untuk lebih mudah memperebutkan jabatan kepemimpinan menuju jabatan presiden.

Pemilu adalah cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah sebuah Negara demokratis atau tidak, karena memberikan momentum kepada masyarakat untuk memilih wakil mereka dan menentukan siapa yang akan memimpin Negara selanjutnya. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan. Jika partisipasi masyarakat tidak dimaksimalkan, pemilihan hanya akan menjadi alat formal untuk menilai demokrasi dan tidak memiliki substansi.

Daftar Pustaka

Adeng Muchtar, "Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah" (Bandung:

Andrew Reynolds et al., "Desain Sistem Pemilihan: Handbook IDEA Internasional Baru", buku yang diterbitkan di Stockholm oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance pada tahun 2005.

Ghalia "Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia" yang diterbitkan di Jakarta Indonesia pada tahun 2006.

Leo Agustino " Pengantar Ilmu Politik", diterbitkan di Jakarta oleh PT.Raja Rafindo pada tahun 2007.

Miriam Budiarjo "Dasar-Dasar Ilmu Politik" diterbitkan di Jakarta oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2015.

Iqbal"Fiqh Siyasah" diterbitkan pada tahun 2007 di Jakarta oleh Gaya Media Pratama.

Jimly Asshiddiqie "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara "Diterbitkan di Jakarta oleh Rajawali Press pada tahun 2008.

Fariz, Muhammad Abdul Qadir Abu, menulis buku berjudul Sistem Politik Islam (Jakarta: Robbani Press, 2000),

Kartono, K., Pemimpin dan Kepemimpinan, diterbitkan di Jakarta oleh

Raja Grafindo pada tahun 1994.

Munawir, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1993).

Pulung, J. Suyuti, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Raja Garafindo Persada Utama, 1994), dan Sjadzali Pustaka Setia, cetakan pertama, 2004).